

BEBERAPA SEGI KONFLIK VIETNAM — KAMBOJA : MENUJU HEGEMONI KAWASAN?

A.R. SUTOPO

PENDAHULUAN

Kemelut peperangan di kawasan Indocina antara kekuatan-kekuatan "rakyat progresif revolusioner" dan "kaum imperialis" dan "reaksioner" telah berakhir pada tahun 1975 yang lalu. Puncak kemenangannya ditandai oleh mundurnya Amerika Serikat dari keterlibatannya dalam kawasan itu. Bagi perencana-perencana strategi militer di Hanoi ini berarti berakhirnya masa penitikberatan dan konsentrasi perhatiannya terhadap masalah-masalah di dalam negerinya. Sejak itu para perencana strategi militer di Hanoi mulai memiliki keleluasaan yang lebih besar lagi dalam mencurahkan perhatiannya terhadap dunia luar Vietnam semata-mata. Hanoi mulai memikirkan mana yang akan menjadi sumber ancaman bagi keamanannya di masa yang akan datang, berpikir-pikir tentang siapa teman siapa lawan, dan mencari jalan apa yang paling baik untuk memberikan jaminan maksimum bagi keamanan negerinya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Hanoi setelah berakhirnya Perang Vietnam ialah hubungan negeri itu dengan Kamboja. Meskipun kedua-duanya, Kamboja dan Vietnam, diperintah oleh rezim komunis, ternyata terdapat pertanda adanya konflik kepentingan di antara mereka. Konflik kepentingan ini justru sekarang tambah kelihatan dengan semakin seringnya terjadi insiden perbatasan dan teritorial yang melibatkan pertempuran di daerah-daerah perbatasan bersama mereka. Skala pertempuran di daerah perbatasan meningkat pada penghujung tahun 1977 dan dalam memulai lembaran awal tahun 1978.

Sejarah masa lalu tampaknya memiliki andil dalam terjadinya konflik-konflik di sepanjang perbatasan kedua negara ini. Sehubungan dengan itu perlu diingat kembali pernyataan Bernard K. Gordon yang mengatakan bahwa telah timbul banyak masalah yang semakin mempertajam ketegangan-ketegangan Vietnam—Kamboja sejak kemerdekaan mereka. Dari problem-problem itu, persengketaan teritorial merupakan gejala yang paling jelas.¹

Ada beberapa masalah yang mempengaruhi stabilitas politik dan hubungan antara negara-negara di kawasan Indocina khususnya, yang dapat berpengaruh juga terhadap kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Mundurnya Amerika Serikat dari gelanggang politik Indocina akan mempengaruhi tingkat intensitas persaingan dua negara besar lainnya, Republik Rakyat Cina (RRC) dan Uni Soviet, untuk berebut pengaruh di Asia Tenggara khususnya di kawasan Indocina. Vietnam sendiri sebagai negara yang paling kuat di kawasan itu perhatiannya mulai diarahkan ke luar dan bermaksud untuk memegang kepemimpinan politik di kawasannya. Tetapi negara-negara yang baru saja lepas dari masa perang dan kemelut di dalam negeri yang cukup panjang, masih dihadapkan kepada persoalan dalam negeri yang rawan, seperti masalah perekonomian nasional, persatuan dan kerukunan bangsa, pembangunan, dalam menuju masyarakat yang mereka cita-citakan masing-masing. Masalah-masalah itu ternyata sekarang sedang dihadapi oleh dua negara yang bertetangga dan seideologi tetapi juga menimbulkan konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan di antara mereka karena persepsi yang berbeda.

Konflik yang terjadi di kawasan Indocina tentu akan mempunyai pengaruh terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Ketegangan kawasan dapat meningkat karena konflik antar negara biasanya menarik kehadiran negara-negara besar untuk mengadu peruntungannya di tempat yang bersangkutan. Tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang bertalian dengan konflik Vietnam—Kamboja dewasa ini. Pertama akan dibicarakan mengenai kemungkinan faktor-faktor yang turut mempengaruhi meningkatnya konflik negara tersebut. Pada tahap berikutnya akan dibicarakan mengenai perspektif dan implikasi dari konflik tersebut yang kemudian diakhiri dengan penutup.

¹ Bernard K. Gordon, *The Dimensions of Conflict in Southeast Asia*, (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1966), hal. 48

PERSOALAN WILAYAH DAN WARISAN SEJARAH

Persengketaan mengenai kedaulatan wilayah merupakan salah satu gejala yang paling jelas dalam konflik antara Vietnam dan Kamboja dalam sejarah modern dewasa ini. Perselisihan mengenai kedaulatan teritorial ini mempunyai akarnya dalam sejarah masa lalu hubungan dua negara bertetangga tersebut. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa Kamboja dan Vietnam sekarang merupakan, seperti halnya sejarah bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya, kelanjutan dari sistem kerajaan dan penjajahan masa lalu mereka masing-masing. Kerinduan atau nostalgia akan kejayaan masa lampau yang pernah dialami oleh bangsanya mengambil peranan yang cukup penting dalam persepsi politik dari elite yang memegang tampuk kekuasaan dalam sejarah modern Kamboja. Keadaan ini tampaknya juga berlaku bagi para penguasa yang sekarang memimpin Kamboja — yaitu setelah kaum komunis menguasai negeri itu sejak bulan April 1975.

Kamboja pernah mengalami masa kejayaan dalam sejarah masa lampauanya yaitu pada sekitar abad ke—12 dan abad ke—13. Luas daerah kekuasaannya pada masa itu hampir mencapai Birma di sebelah barat, di sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan kerajaan Champa, di bagian selatan meliputi hampir seluruh bagian Vietnam Selatan sekarang dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di bagian utara daerahnya hampir mencapai daerah perbatasan antara Laos—RRC sekarang. Tetapi luas wilayahnya itu ternyata tidak dapat dipertahankan terus. Secara berangsur-angsur wilayah kerajaan Kamboja menjadi korban perebutan kekuasaan dan perluasan daerah yang dilakukan oleh Muangthai dan Vietnam (yang dahulu disebut Annam).¹ Bahkan nyaris seluruh wilayah Kamboja menjadi daerah taklukan dari atau Muangthai atau Vietnam dalam abad ke—18 dan permulaan abad ke—19.

Pada dasarnya perubahan-perubahan garis perbatasan antara Kamboja dengan negara-negara tetangganya, khususnya antara Kamboja dan Vietnam, tidak hanya terjadi pada sekitar abad-abad 18 dan 19. Perubahan-perubahan atau pergeseran demarkasi perbatasan antara kedua negara ini masih terus berlangsung hingga berakhirnya Perang Dunia II. Bahkan sampai dengan dicapainya kemerdekaan

¹ Charles A. Fisher, *Southeast Asia, A Social, Economic and Political Geography*, (London, Methuen & Co., Ltd., 1969), hal. 109—115

negara-negara di kawasan Indocina persoalan perbatasan yang belum definitif selalu muncul dalam hubungan mereka. Sejarah modern bangsa Kamboja dan Vietnam sekarang tampaknya merupakan suatu proses yang belum terhenti dari kaitan sejarah masa silam bangsa tersebut. Hal ini ditandai oleh sikap para pemimpin Kamboja yang tidak jarang mempersoalkan wilayah, daratan maupun kepulauan, yang sekarang sedang dikuasai oleh negara-negara tetangganya, khususnya oleh Vietnam.

Ada beberapa contoh yang dapat menggambarkan perselisihan dua negara bertetangga itu yang mempunyai kaitan dengan masalah kedaulatan teritorial. Kiranya tidak perlu untuk menarik terlalu jauh kepada sejarah masa silam hubungan Vietnam—Kamboja untuk melihat menonjolnya klaim wilayah tersebut. Pada tahun 1949 misalnya, sebelum Kamboja memperoleh kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Perancis para pemimpin Kamboja telah menentang tindakan sepihak pemerintah kolonial dalam memasukkan Cochinchina (bagian paling selatan Vietnam sekarang) ke dalam wilayah Vietnam. Dalam Konferensi Jenewa tahun 1954 mengenai Indocina sekali lagi Menteri Luar Negeri Kamboja mengajukan tuntutan atas daerah tersebut. Pada pokoknya, waktu itu pemerintah Kamboja memperingatkan bahwa pemerintah kolonial Perancis telah melakukan kesewenangan dalam menentukan pembagian wilayah di kawasan Indocina khususnya yang menyangkut Kamboja—Vietnam dan Kamboja telah memprotesnya sejak abad ke—19.¹

Pada jaman jayanya pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk yang lalu persoalan kedaulatan teritorial merupakan salah satu sebab ketidakrukunan antara Kamboja dengan Vietnam Selatan. Misalnya masalah siapa yang mendaulat pulau-pulau di daerah Teluk Siam menyebabkan memburuknya hubungan Sihanouk-Ngo Dinh Diem. Tentu saja persoalan ini ada rangkaiannya dengan kedudukan Kamboja yang waktu itu diapit oleh dua negara sekutu Amerika Serikat, yaitu Muangthai di sebelah barat dan Vietnam Selatan di sebelah timur, sementara Kamboja melakukan politik netral.² Tambah lagi perlakuan yang kurang baik dari pemerintah Vietnam Selatan terhadap penduduk

1 Bernard K. Gordon, *op. cit.*, hal. 46—48

2 *Ibid.*, hal. 53—54

Vietnam keturunan Kamboja, lazim disebut suku Khmer Krom, semakin membuat komplikasi dalam hubungan antara Kamboja dan Vietnam.¹

Persoalan mengenai siapa yang berhak atas kedaulatan beberapa kepulauan di daerah Teluk Siam ini timbul kembali setelah berkuasanya kaum Komunis di Kamboja dan setelah jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan Vietnam Utara. Pada tahun 1975 itu telah terjadi suatu pertempuran antara pasukan Kamboja dan Vietnam untuk memperebutkan sebuah pulau yang dikenal dengan nama Paolo Wai (sering disebut juga dengan nama Kaoh Wai) yang dimenangkan oleh pasukan Vietnam. Dengan demikian, walaupun sudah sama-sama penguasa komunis yang memerintah dua negara tersebut, kenyataan itu tidak menghalangi terjadinya bentrokan fisik bilamana kepentingan nasional masing-masing bertemu dalam satu medan.

Konflik-konflik di sekitar daerah perbatasan kembali diungkapkan pada bulan Agustus 1977 yang lalu ketika pasukan kedua negara tersebut terlibat dalam suatu pertempuran perbatasan.² Menghadapi situasi ini Vietnam kemudian mengirimkan Jenderal Vo Nguyen Giap ke daerah perbatasan yang sedang panas itu. Ada dua versi mengenai alasan kenapa pertempuran perbatasan ini terjadi antara Kamboja dan Vietnam setelah lebih dari dua tahun dikuasai oleh kaum komunis. Versi pertama menyatakan bahwa pertempuran ini terjadi karena pasukan-pasukan Khmer Merah yang melakukan pengejaran terhadap para pengungsi Kamboja yang lari ke arah wilayah Vietnam telah menyeberangi daerah perbatasan Vietnam. Versi lainnya mengatakan bahwa pertempuran itu bermula dari penumpasan terhadap para pemberontak dan pengacau di Vietnam Selatan yang dilakukan oleh pasukan Vietnam di daerah perbatasannya dengan Kamboja dan dalam pengejarannya pasukan Vietnam itu menyeberangi daerah perbatasan Kamboja.³ Keadaan ini jelas menggambarkan betapa masalah perbatasan dari kedua negara masih belum dibatasi secara jelas.

Kejadian ini diulangi lagi pada tutup tahun 1977 dan dalam membuka tahun baru 1978. Skala pertempuran kali ini jauh lebih besar

1 John F. Cady, *The History of Post-War Southeast Asia : Independence Problems*, (Ohio University Press, 1974), hal. 398—403

2 Nayan Chanda, "That's far enough, says Hanoi", dalam *Far Eastern Economic Review*, 19 Agustus 1977, hal. 10—12

3 *Ibid.*

daripada pertempuran-pertempuran perbatasan yang terjadi sebelumnya, bahkan Vietnam sempat masuk ke dalam wilayah Kamboja sampai beberapa puluh kilometer.¹ Kembali lagi tuduh-menuduh antara satu dengan lainnya bahwa pihak lain telah memulai melanggar kedaulatan wilayah, melakukan kekerasan, pembunuhan, perampokan dan perkosaan terhadap penduduk sipil. Tampaknya melalui peristiwa-peristiwa tersebut menjadi nyata bahwa faktor perbatasan, dus menyangkut kedaulatan teritorial, merupakan salah satu alasan terjadinya konflik-konflik kepentingan antara mereka. Atau paling tidak, ketidakjelasan perbatasan dimanfaatkan untuk membuat alasan atas maksud-maksud lain dari masing-masing pihak yang kepentingannya tersebut dapat diselubungi dalam konflik-konflik perbatasan atau teritorial.

Ada hal lain yang memperpeka masalah kedaulatan wilayah dalam hubungan Kamboja—Vietnam itu. Hal itu ialah perasaan anti yang tertanam di kalangan bangsa Kamboja (Khmer), atau setidaknya rasa curiga, terhadap bangsa Vietnam yang agresif. Sebelumnya telah disebutkan tentang ekspansi masa lalu dari bangsa Vietnam ke dalam wilayah Kamboja yang makin mempersempit wilayah kerajaan Kamboja. Keadaan yang demikian ini ditambah lagi dengan makin masuknya bangsa Vietnam ke Kamboja sebagai akibat kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah kolonial Perancis dalam program perkebunan dan administrasi Kamboja. Program yang dilancarkan oleh pemerintah Perancis untuk memperoleh keuntungan ekonomi di Kamboja itu, antara lain dengan membuka perkebunan-perkebunan di Kamboja, menghasilkan akibat sampingan, yaitu semakin berperannya pendatang-pendatang dari Vietnam dalam bidang ekonomi dan birokrasi di Kamboja.² Di Kamboja terdapat antara 300-400 ribu orang keturunan Vietnam yang dahulu banyak menghuni ibukota Kamboja, Phnom Penh.³ Hal ini mengakibatkan semacam sakit hati di kalangan bangsa Kamboja yang seharusnya menjadi "tuan" di negerinya sendiri, tetapi justru di negerinya hidup lebih melarat dan sengsara di desa-desa dalam sektor pertanian dibanding dengan kehidupan dari kaum pendatang Vietnam yang memang memiliki kecakapan lebih baik.

1 "When Communists Collide", *Time*, 16 Januari 1978, hal. 8—9

2 Lihat misalnya, John F. Cady, *op. cit.*, hal. 372—374 dan Charles A. Fisher, *op. cit.*, hal. 567—570

3 Tentang jumlah penduduk Kamboja keturunan Vietnam ini didasarkan pada data dari Cady, *ibid.*, dan Fisher, *ibid.*, hal. 559

Sementara itu dalam masa perjuangan kemerdekaan Indocina yang kemudian diakui melalui Konperensi Jenewa tahun 1954, gerakan komunis di Kamboja merasa ditinggalkan oleh rekannya kaum komunis Vietnam yang semula sama-sama sebagai warga gerakan komunis di Indocina, yang waktu itu disebut sebagai Partai Komunis Indocina.³ Menurut hasil dari Konperensi Perdamaian Jenewa 1954 mengenai Indocina antara lain disebutkan bahwa kedaulatan atas wilayah Kamboja diserahkan kepada raja, sementara kelompok kaum komunis di Kamboja tidak mendapatkan konsesi daerah kekuasaan. Ini berbeda dengan gerakan komunis lainnya di Indocina yang mendapatkan konsesi : Partai Komunis Vietnam mendapatkan kekuasaan atas daerah Vietnam bagian utara sedangkan kaum komunis di Laos, Pathet Lao, memperoleh pijakan kekuasaan di dua propinsi bagian utara Laos. Malahan kelompok Kamboja dipaksa untuk mengakui kedaulatan raja tanpa diakui haknya sebagai kekuatan politik. Di kalangan pemimpin Vietnam pengorbanan kelompok Kamboja dalam konperensi Jenewa tersebut hanya dipandang sebagai taktik dalam usahanya mengkonsolidasi gerakan komunis di Indocina, tetapi hal ini dipandang secara lain oleh kaum komunis Kamboja. Pada akhirnya kelompok Kamboja ini memutuskan hubungan dengan Partai Komunis Indocina dan mulai menganut garis ultra nasionalis. Barangkali ini merupakan benih perselisihan antara kaum komunis Kamboja dan kaum komunis Vietnam dewasa ini.

PERSAINGAN UNI SOVIET — RRC

Faktor lainnya yang bisa jadi menambah tajamnya konflik antara Kamboja—Vietnam dewasa ini ialah perebutan pengaruh antara Uni Soviet dan RRC di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indocina. Kawasan Indocina yang telah seluruhnya dikuasai oleh kaum komunis mempunyai daya tarik tersendiri dalam persaingan mencari pengaruh dari dua negara komunis terbesar itu. Kesamaan ideologi telah menempatkan negara-negara Indocina untuk diperhatikan lebih banyak daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Akibatnya ialah intensitas persaingan dua negara komunis itu semakin meningkat di kawasan Indocina. Hal ini ternyata dikesankan oleh adanya pola

1 Mengenai adanya Partai Komunis Indocina ini antara lain dapat diikuti tulisan Hoang Van Chie, *From Colonialism to Communism, A Case History of North Vietnam*, (London, Pall Mall Press Ltd., 1964), hal 4 dan Bab 5

hubungan kedua negara komunis itu dengan negara di kawasan Indocina. Uni Soviet memelihara hubungan yang baik dengan Vietnam sementara hubungannya dengan Kamboja boleh dikata jelek. Sebaliknya RRC pada saat ini merupakan satu-satunya negara dengan siapa Kamboja memelihara hubungan paling akrab, sedangkan hubungan RRC dengan Vietnam kelihatannya tidak sebaik hubungannya dengan Kamboja.

Setelah kegagalan kudeta komunis di Indonesia pada tahun 1965, maka sasaran perluasan pengaruh Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara ialah Vietnam Utara yang sedang berperang melawan kehadiran Amerika Serikat di sana. Meskipun Asia Tenggara dipandang kurang vital kedudukannya bagi Uni Soviet bila dibandingkan dengan kedudukan Timur Tengah dan Asia Selatan, Uni Soviet tetap mempunyai kepentingan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di daerah Indocina.¹ Kedudukan Asia Tenggara khususnya Indocina masih cukup penting dalam politik Uni Soviet sekalipun tidak sevitral Eropa Barat, Timur Tengah atau Asia Selatan. Di samping maksudnya untuk hadir di kawasan Asia Tenggara agar diakui sebagai negara Asia dan sebagai negara besar, kehadirannya dalam politik di Asia Tenggara khususnya dalam kawasan Indocina dimaksudkan untuk menghadapi perluasan pengaruh Cina di kawasan tersebut dalam mencari kepemimpinan politik dan ideologis.² Di samping itu tentu ada maksud untuk menghadapi juga pengaruh negara besar lainnya dalam kawasan ini, yaitu Amerika Serikat dan kekuatan ekonomi Jepang.

Di kawasan Indocina khususnya, Uni Soviet mencoba menanamkan pengaruhnya melalui Vietnam Utara dengan semakin memberikan bantuan ekonomi dan militer pada saat Vietnam masih berperang menghadapi Amerika. Tetapi setelah Doktrin Nixon dikumandangkan, maksud di kawasan Asia Tenggara terutama ditujukan untuk menghadapi Cina, dan Uni Soviet tidak akan

1 Tentang sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Uni Soviet di Asia Tenggara antara lain dapat diikuti dalam Robert C. Horn, "The Soviet Perspective", dalam Sudershan Chawla, Merlvin Gurtov, dan Alain-Gerard Marcot, *Southeast Asia Under the new Balance of Power*, (New York: Praeger Publishers, 1975), hal. 30—50; dan Guy J. Pauker. *The Soviet Union and Southeast Asia*, (Santa Monica, The Rand Corporation, Juli 1973)

2 Robert C. Horn, *ibid.*, hal. 31-32

senang kalau kepergian Amerika Serikat mengakibatkan diisinya kekosongan Asia Tenggara dari pengaruh oleh negara besar lainnya.¹ Uni Soviet tidak berhasil mendekati Kamboja karena dalam pemerintahan Pangeran Sihanouk Kamboja telah mendekati RRC karena takut pada Vietnam, yang seperti disebutkan sebelumnya, dicurigainya sebagai haus akan ekspansi teritorial gaya abad ke—19 itu. Dan setelah kudeta yang dilakukan oleh Lon Nol, Uni Soviet tidak bersedia memberikan tempat bagi Sihanouk dan juga tidak mengakui pemerintahan pengasingan yang kemudian dibentuk oleh Sihanouk yang bermarkas di Peking.

Bukan tidak beralasan bilamana Uni Soviet sesudah tahun 1965 memilih Vietnam sebagai sasaran pengaruhnya setelah gagal berpetualang di Indonesia sebelumnya. Vietnam merupakan suatu negara yang paling besar potensinya untuk menjadi sebuah negara yang kuat di Asia Tenggara. Dilihat dari luas wilayah, militansi penduduknya, jumlah penduduk, dan kekuatan militernya sekarang, Vietnam pasti bisa berkembang menjadi suatu kekuatan regional yang berperan penting baik dalam percaturan politik maupun dalam memelihara keamanan kawasan Asia Tenggara pada umumnya.² Dengan terbentuknya suatu koalisi antara Uni Soviet dan Vietnam, dapat diharapkan bahwa Uni Soviet akan mampu mengurung RRC dalam mencari kepemimpinan politik dan ideologis di kawasan Asia Tenggara, khususnya di daratan Indocina. Minimal Hanoi mempunyai peluang untuk muncul sebagai kekuatan hegemoni di kawasan Indocina yang penting artinya bagi Uni Soviet dalam "mengepung" RRC baik secara politik maupun militer.

Sedangkan RRC yang menduduki posisi strategis dapat diramalkan akan memainkan peranan yang terus menerus di Asia Tenggara, baik karena letak geografis Asia Tenggara yang dekat sekali dengan RRC, atau karena pertimbangan historis Asia Tenggara yang dipandang sebagai daerah pengaruhnya pada masa lalu, maupun karena di Asia Tenggara sendiri RRC mempunyai hubungan berkat

1 Setelah kunjungan Presiden Nixon ke RRC pada tahun 1972 yang lalu ada kesan seolah-olah Amerika Serikat mengakui bahwa Asia Tenggara adalah daerah pengaruh dari RRC. Adapun negara besar atau kekuatan lain yang mempunyai peluang untuk mengisi kekosongan Asia Tenggara tersebut antara lain RRC, Jepang dan tentu saja Uni Soviet sendiri

2 Mengenai kekuatan fisik militer Vietnam dewasa ini lihat dalam terbitan berkala The International Institute for Strategic Studies, *Military Balance 1977—1978*, (London, 1977), hal. 65

adanya apa yang disebut Cina perantauan dan adanya gerakan-gerakan komunis, legal maupun terlarang, yang hidup di banyak negara Asia Tenggara.¹ Ketegangan Sino-Soviet, sejak tampilnya pemerintahan Khrushchov di Uni Soviet yang mengakibatkan buyarnya monolitisme gerakan komunisme internasional, makin meningkatkan arti penting kedudukan Asia Tenggara bagi RRC dalam menghadapi pengepungan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Dengan demikian Asia Tenggara menduduki posisi yang lebih vital bagi kepentingan nasional RRC daripada bagi kepentingan Uni Soviet.

Indocina merupakan kawasan yang langsung berbatasan dengan RRC. Pada waktu Perang Vietnam masih berkecamuk, baik Uni Soviet maupun RRC memberikan bantuan ekonomi maupun militer. Tetapi tampaknya RRC tidak berhasil membina hubungan khusus dengan Vietnam baik ketika perang masih berlangsung maupun setelah selesainya Perang Vietnam pada tahun 1975. Namun RRC berhasil baik dalam diplomasinya di Indocina dengan Kamboja yang merasa takut akan ekspansionisme Vietnam. Berbeda dengan Uni Soviet yang tidak memberikan harapan kepada Pangeran Sihanouk ketika digulingkan oleh Lon Nol, RRC dengan tegas hanya mengaku pemerintahan yang dibentuk oleh Pangeran Sihanouk dalam pengasingan dan secara langsung memberikan dukungan kepada perjuangan Khmer Merah untuk merebut kembali kekuasaan dari pemerintahan Lon Nol. Ketika pasukan Khmer Merah berhasil mengambil alih kekuasaan, ucapan terima kasih diberikan kepada RRC oleh para penguasa baru di Kamboja, sedangkan Uni Soviet yang mengakui pemerintahan rezim Lon Nol tidak diakui memberi sumbangan bagi perjuangan rakyat Kamboja dan dituduh menjalankan politik oportunistis yang tidak konsekwen dengan perjuangan revolusioner.

Dalam konflik perbatasan yang sekarang terjadi antara Kamboja dan Vietnam tampaknya dua negara besar komunis itu, secara tidak langsung, mencoba berada di belakang masing-masing pihak: RRC memberi prioritas politiknya bagi Kamboja sedangkan Uni Soviet bagi Vietnam. Karena memang belum terdapat bukti bahwa telah terjadi aliansi antara RRC dan Kamboja atau Uni Soviet dan Vietnam, kesimpulan itu baru ditarik berdasarkan pada sikap mereka (baik Uni Soviet maupun RRC) dalam memberitakan konflik Kamboja—Vietnam

¹ Alain-Gerard Marsot : "The Chinese Perspective", dalam Sudershan Chawla, et. al., *loc. cit.*, hal. 51—77

dalam media massa masing-masing. RRC lebih menonjolkan pemberitaan mengenai kedudukan Kamboja sedangkan Uni Soviet lebih banyak memuat berita tentang Vietnam.¹ Tetapi jika dinilai secara keseluruhan dari sikap "memihak"-nya RRC dan Uni Soviet pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di kawasan Indocina itu, tampaknya Uni Soviet lebih kelihatan sikapnya yang jauh menguntungkan Vietnam dan memojokkan Kamboja, sedangkan RRC kelihatannya lebih menahan diri dan mengharapkan agar pertikaian dari dua negara bertetangga itu dapat diselesaikan melalui perundingan-perundingan.

Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa adanya keinginan pihak luar untuk mengambil keuntungan dari konflik dua negara bertetangga ini, bukan berarti bahwa konflik itu sebagian terbesar disebabkan atau dimulai dari titik kepentingan negara besar yang mencoba mencari pengaruh di sana. Khususnya mengenai Vietnam orang harus berhati-hati apakah benar Vietnam telah merelakan diri wilayahnya dan kepentingan politiknya diikatkan dan dipergunakan sebagai ajang perebutan pengaruh negara-negara besar, sekalipun negara besar tersebut adalah negara-negara komunis. Bahwa negara-negara komunis di luar kawasan Indocina itu memiliki kepentingan itu benar adanya, tetapi belum berarti bahwa kepentingan yang diadu itu juga telah disetujui oleh pihak-pihak setempat (yaitu Vietnam dan Kamboja). Jadi dapat dikatakan bahwa maksud dua negara besar yang bersaing di kawasan Indocina itu ialah mencari keuntungan yang bisa diperoleh melalui konflik dua negara bertetangga itu untuk lebih menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut.

MENCARI HEGEMONI REGIONAL INDOCINA

Vietnam sekarang merupakan perkembangan dari apa yang dikenal sebagai kerajaan Annam pada masa lalu. Semula Annam hanya merupakan suatu kerajaan kecil di lembah Sungai Merah yang kemudian berhasil meluaskan daerahnya ke arah selatan. Proses ini terjadi selama ratusan tahun yang lalu melalui penaklukan dan pencaplokkan wilayah sebagaimana terjadi dalam sejarah hampir setiap

¹ Lihat berita-berita dalam harian *Sinar Harapan* tanggal 2 Januari 1978 dibawah judul "Divisi-divisi Vietnam Serbu Wilayah Kamboja, Phnom Penh Tuduh Soviet Ikut Terlibat Dalam Serangan Militer", tanggal 3 Januari 1978 dalam rubrik Luar Negeri di bawah judul "Perancis Sesalkan Pertempuran Vietnam — Kamboja, Dubes Kamboja Tinggalkan Hanoi", dan tanggal 9 Januari 1978 dalam rubrik Luar Negeri dengan judul "Uni — Soviet dan RRC Hentikan Kiriman Logistik Pada Kedua Pihak".

bangsa. Tapi meskipun penaklukan dan pencaplokan wilayah dewasa ini tidak dipandang sebagai cara bangsa yang terpuji, ada ketakutan di kalangan bangsa Kamboja akan agresivitas bangsa Vietnam yang merupakan ancaman bagi eksistensi Kamboja sebagai suatu negara di masa yang akan datang. Ketakutan Kamboja seperti itu memang bukan tidak beralasan.

Selain apa yang telah dikemukakan sebelumnya dalam hal persoalan wilayah dari sejarah masa lalunya, Vietnam tampak memiliki ambisi untuk mengambil kepemimpinan di kawasan Indocina. Pada masa perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan Perancis dalam sejarah modern Vietnam, Ho Chi Minh tampil sebagai pemimpin dari salah satu kelompok partai perjuangan itu. Pada dasawarsa 1920—an paham komunisme telah masuk ke Vietnam antara lain karena kemelut politik yang terjadi di daratan Cina pada masa itu. Ho Chi Minh pada masa itu telah merupakan salah seorang dari agen-agen Comintern di Timur Jauh,¹ yang tugas utamanya ialah memperkenalkan komunisme di kalangan bangsa Vietnam.

Organisasi komunis di Vietnam mulai dibentuk oleh Ho Chi Minh pada tahun 1925 di Canton dengan nama *VietNam Thanh-Nien Cach-Menh Dong-Chi Hoi* atau Perhimpunan Kamerad Revolusioner Muda Vietnam. Pembentukan organisasi ini oleh Ho Chi Minh ditujukan guna mengembangkan komunisme di kalangan muda Vietnam. Setelah terjadinya perpecahan di kalangan kaum komunis Vietnam pada tahun 1927, Ho Chi Minh memanggil tokoh-tokoh komunis Vietnam dan ia berhasil memecahkan perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka membentuk "Partai Komunis Vietnam". Tetapi nama ini kemudian dalam tahun 1931 diubah menjadi "Partai Komunis Indocina" dan dengan demikian jangkauan gerakan ini meliputi Laos dan Kamboja dan mengambil tempat sebagai pusat kegiatannya di dalam wilayah Vietnam.² Perubahan nama dari Vietnam menjadi Indocina ini menunjukkan, bahwa di kalangan pemimpin komunis Vietnam pada masa yang lalu terdapat suatu keinginan akan kepemimpinan Vietnam di antara bangsa-bangsa Indocina. Namun demikian, dalam rangka mencari dukungan perjuangan di kalangan bangsa Vietnam sendiri dalam menghadapi kembalinya Perancis di Indocina, dalam kongresnya yang kedua pada tahun 1951 nama Partai Komunis Indocina diganti lagi dengan nama Partai Pekerja Vietnam. Setelah kaum

1 Lihat dalam Hoang Van Chi, *op. cit.*, hal. 42—43

2 *ibid.*, hal. 48—49

komunis berhasil menguasai seluruh Vietnam, nama itu dikembalikan lagi menjadi "Partai Komunis Vietnam" pada bulan Desember 1976 yang lalu.

Pembagian Indocina dalam tiga negara setelah Perancis pergi dalam Perjanjian Jenewa tahun 1954 tampaknya belum dapat mengakhiri ketakutan Kamboja khususnya terhadap Vietnam. Ketakutan Kamboja pada waktu itu terutama tertuju kepada Vietnam Selatan, tetapi juga kepada Vietnam Utara, karena persepsinya akan mengalami nasib seperti kerajaan Champa yang dicaplok oleh Vietnam (Annam).¹ Menghadapi keadaan semacam itu, Pangeran Sihanouk pada tahun 1964 memberikan alasan kenapa Kamboja lebih senang mendekati RRC daripada berhubungan baik-baik dengan dua negara Vietnam pada masa itu. Antara lain Sihanouk menyatakan :

"....., kita tidak ingin menjadi Merah. Tetapi pada suatu saat kita harus menerima hal itu karena kita tidak akan mampu menghindarinya; yaitu, membekali kita agar mampu mengamankan integritas wilayah kita. Kita tidak ingin menjadi seperti Champa. Kita hanya ingin selalu memelihara bangsa Khmer dan bendera Khmer." ²

Dalam persepsi para pemimpin Kamboja pada sekitar akhir dasawarsa 1950—an dan dasawarsa 1960—an sudah disadari, bahwa pada suatu saat bangsa Kamboja akan terpaksa menerima komunisme demi tegaknya bangsa Khmer dan tetap berkibarnya bendera nasional bangsa Khmer. Untuk itu pula Sihanouk tidak segan-segan meminta perlindungan dari RRC, karena jika kaum Viet Minh menimbulkan kesukaran bagi Kamboja, maka hanya Peking-lah yang akan menghentikannya.³ Setidak-tidaknya ketakutan Sihanouk ini mencerminkan bahwa Vietnam, apakah itu Utara atau Selatan, pada suatu saat akan mencoba mendominasi, kalau tidak mendikte, negara-negara di kawasan Indocina, dalam hal ini khususnya Kamboja.

Apakah yang dapat dilihat setelah semua negara Indocina dikuasai seluruhnya oleh kaum komunis? Pada semester pertama tahun 1976 Vietnam telah dipersatukan dengan pusatnya di Hanoi. Pada bulan Juli 1976 pemerintah Vietnam melepaskan "merpati" untuk

1 Lihat dalam Bernard K. Gordon, *op. cit.*, khususnya hal. 55—56

2 Bagian dari pidato Pangeran Sihanouk pada tanggal 21 Pebruari 1964 yang dikutip oleh Bernard K. Gordon, *ibid.*, hal. 54

3 *Ibid.*, hal. 56. Janji Peking ini diperoleh oleh Sihanouk ketika ia berkunjung ke Peking pada tahun 1956

berkomunikasi dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, antara lain ke negara-negara ASEAN. Pada bulan itu dalam mengakhiri muhibahnya si "merpati" Phan Hien, Wakil Menteri Luar Negeri, sampai di Laos. Dalam pernyataan bersamanya antara lain dikemukakan keinginan Vietnam dan Laos untuk meningkatkan kerjasama dengan Kamboja di segala bidang serta membentuk suatu *front persatuan* Vietnam—Laos—Kamboja guna menghadapi segala urusan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.¹ Ajakan yang disponsori oleh Vietnam ini dapat ditafsirkan, karena dalam kunjungan itu tidak hadir perutusan Kamboja, sebagai pertanda kemauan kuat Vietnam untuk memimpin tiga negara di kawasan Indocina dalam berurusan dengan negara-negara lain. Tetapi ternyata Kamboja tidak memberikan tanggapan positif terhadap ajakan dari Vietnam yang telah "mendatangi" Laos itu.

Meskipun Hanoi turut membantu menyusun kekuatan Khmer Merah setelah kudeta Marsekal Lon Nol di Kamboja, ternyata sikap Khmer Merah terhadap Vietnam sekarang tidak menunjukkan adanya suatu hubungan khusus di antara mereka. Ini barangkali adalah kelanjutan sikap ultra nasionalisnya pemimpin-pemimpin Khmer Merah setelah mereka mengingkari hubungannya dengan gerakan komunis Indocina seperti telah disebutkan sebelumnya. Dalam konflik yang terjadi sekarang, para pemimpin Khmer Merah jelas menuduh ambisi Vietnam untuk menguasai seluruh Indocina, melalui hegemoni politik membentuk suatu rezim Pro-Hanoi di Kamboja, maupun pembentukan federasi Indocina, sebagai sebab terjadinya pertempuran di sekitar perbatasan kedua negara.² Apalagi dukungan materiil Vietnam dengan luas wilayah, kekuatan militer, jumlah penduduk, dan militansi yang telah ditempa selama puluhan tahun tidak dapat dibandingkan begitu saja dengan Kamboja yang hanya memiliki penduduk dan kekuatan militer yang terbatas.

MASALAH SOSIAL EKONOMI DI DALAM NEGERI

Di lain pihak, Vietnam dan Kamboja yang baru saya mengalami masa perang masing-masing menghadapi persoalan sosial ekonomi di dalam negerinya. Perang Vietnam menghadapi Amerika maupun pergolakan di dalam negeri Kamboja sendiri telah mengakibatkan

1 *Antara*, 30 Juli 1976/A

2 *Sinar Harapan*, 2 Januari 1978

terlantarnya pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat mereka. Proses transformasi sosial yang dijalankan oleh masing-masing negara ini di negerinya menambah kompleksnya masalah dalam negeri mereka. Suatu pemerintahan yang sedang menghadapi masalah dalam negeri yang gawat terkadang mencoba mengalihkan perhatian masyarakat dari kerisauan-kerisauannya kepada masalah-masalah yang dicarinya di luar, antara lain dengan membuat soal dengan negara tetangganya. Keadaan ini bisa jadi juga berlaku bagi hubungan konflik yang sedang berjalan antara Vietnam dan Kamboja.

Dalam konflik sekarang ini telah dilibatkan pula adanya saling tuduh kedua belah pihak tentang bahan pangan yang langka di pihak lainnya, dan oleh karena itu perampokan dan pendudukan daerah yang dianggap subur merupakan jalan ke luar yang bisa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut.¹ menjadi pertanyaan siapakah di antara keduanya yang mengalami kesulitan bahan pangan, dan lebih luas lagi kesulitan ekonomi, dan apakah persoalan pangan dan ekonomi yang berpadu dengan masalah-masalah sosial lainnya cukup berpengaruh sebagai penggerak meningkatnya konflik antara Vietnam—Kamboja?

Tertutupnya Kamboja dari dunia luar merupakan suatu kesulitan bagi pengamat politik untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam negeri ini setelah kaum komunis mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975. Pada umumnya cerita mengenai kejadian-kejadian di dalam negeri Kamboja sebagian terbesar bersumber dari para pengungsi yang berhasil meloloskan diri ke Muangthai.² Peralihan sistem kemasyarakatan dari yang lama menuju ke komunisme yang sedang dilaksanakan oleh penguasa Kamboja tidak berjalan secara suakrela dan lancar. Kelompok-kelompok perlawanan yang membangkang terhadap penguasa baru di Kamboja masih terdapat di daerah-daerah perbatasan Kamboja — Vietnam dan Kamboja — Muangthai. Sementara itu di kalangan Khmer Merah sendiri ter-

1 *Ibid.*

2 Sebagai contoh mengenai hal ini misalnya *Antara* 25 Januari 1977/B memuat suatu perkiraan yang dibuat oleh John Barron dan Anthony Paul dari majalah *Reader's Digest* tentang meninggalnya sekitar 1,2 juta orang Kamboja karena kelaparan, penyakit atau dibunuh. Sementara itu *Indonesian Observer*, 13 Juli 1977 dan *Antara*, 12 September 1977/A memberitakan tentang terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan Khmer Merah. Berita-berita seperti itu sebagian besar bersumber pada informasi yang dapat diperoleh dari para pengungsi Kamboja yang berhasil mencapai Muangthai.

dapat persaingan dan perpecahan yang tajam yang bahkan sering melibatkan bentrokan di kalangan mereka sendiri. Perpecahan di kalangan Khmer Merah ini kiranya erat sekali hubungannya dengan teka-teki di Kamboja tentang siapa sebenarnya yang memimpin negeri itu.

Tambahan lagi dalam bidang ekonomi, keadaannya tidak lebih baik daripada masa-masa sebelumnya, bahkan makin menunjukkan kemerosotan. Hubungan Kamboja yang tidak bertambah baik dengan Muangthai makin menambah sulitnya kehidupan ekonomi Kamboja setelah diperintah rezim Khieu Samphan-Pol Pot-Ieng Sary. Kesulitan utama bagi penduduk Kamboja dewasa ini dalam bidang ekonomi ialah langkanya bahan makanan dan bahan bakar. Situasi ini banyak digambarkan oleh para pengungsi asal Kamboja yang berdatangan ke Muangthai. Untuk mengatasi keadaan bahan pangan itu, antara lain pemerintah Kamboja menempuh kebijaksanaan "mendesakkan" penduduk Phnom Penh untuk menggarap tanah pertanian yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dan menceraiberaikan keluarga mereka. Sementara itu penjatahan makanan (ransum) dilakukan secara ketat, dan kerja paksa dengan pengawasan prajurit-prajurit muda dapat dikatakan sebagai suatu hal yang lumrah di Kamboja dewasa ini. Kalau keadaan seperti yang disebutkan itu memang benar, bukanlah suatu hal yang mustahil bilamana pemerintah Kamboja sedang menghadapi kerawanan-kerawanan sosial ekonomi di dalam negerinya yang sangat gawat.

Sehubungan dengan itu, bekas Perdana Menteri Muangthai yang digulingkan, Thanan Kraivixien, pada bulan Agustus 1977 yang lalu memperkirakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Kamboja di daerah perbatasannya dengan negara tetangganya, khususnya Muangthai dan kemungkinan juga Vietnam, dengan melakukan serangan, pelanggaran wilayah, dan pembunuhan di kalangan penduduk sipil di pedesaan, adalah bagian dari usaha pemerintah Kamboja untuk mengalihkan perhatian rakyatnya dari kemelut yang sedang melanda negerinya.¹ Kiranya kemungkinan itu tidak dapat diabaikan begitu saja sebagai salah satu taktik penguasa Kamboja untuk memecahkan keresahan-keresahan di dalam negerinya, tapi seberapa jauh hal itu memberi dasar atau menjadi suatu alasan yang kuat bagi

1 *Anlra*, 4 Agustus 1977/A

meningkatnya konflik Vietnam—Kamboja kiranya tetap menjadi persoalan.

Vietnam juga mengalami kesulitan ekonomi di dalam negerinya setelah kemenangan revolusi Vietnam menghadapi imperialisme Amerika Serikat seperti diakui sendiri oleh Perdana Menteri Pham Van Dong baru-baru ini.¹ Kesulitan tersebut meliputi kesulitan dalam kehidupan ekonomi dan "kehidupan nasional"-nya. Tetapi yang lebih serius ialah masalah ekonomi Vietnam — yaitu menurunnya jumlah beras sampai jutaan ton — yang merupakan harga yang harus dibayar bagi kemerdekaannya. Merosotnya persediaan bahan pangan ini terutama disebabkan oleh, selain bencana alam, hapusnya bantuan pangan Amerika ke Vietnam Selatan pada masa perang dahulu dan semakin kecilnya suplai bahan pangan dari RRC. Pada masa perang Vietnam dahulu RRC memberikan bantuan cuma-cuma kepada Vietnam, tetapi sekarang Vietnam harus membayar kepada RRC meskipun jumlahnya sekarang jauh lebih sedikit. Untuk mengatasi masalah itu Vietnam juga mulai membentuk apa yang dikenal sebagai "pemukiman ekonomi baru" guna mengatasi masalah-masalah ekonomi dan mengawasi kehidupan nasional secara lebih efektif. Karenanya adalah persoalan besar jika Vietnam mencirikan kesibukan rakyatnya di daerah perbatasan dengan Kamboja sementara rezim yang berkuasa telah memiliki kedudukan yang kuat sekali.

Dengan demikian, jika alasan mengalihkan perhatian dari persoalan di dalam negeri kepada persoalan di luar negeri merupakan salah satu sebab meningkatnya konflik Kamboja—Vietnam, alasan ini tampaknya hanya relevan secara sebagian bagi kebijaksanaan Kamboja saja. Kamboja menghadapi komplikasi yang luas dalam bidang ekonomi dan politiknya, yang sangat berpengaruh bagi stabilitas pemerintahan dan lebih lagi bagi kepemimpinan yang sekarang ada di Kamboja. Sedangkan Vietnam boleh dikata telah mempunyai suatu aparat rezim yang telah mapan, meskipun negara ini juga masih menghadapi kesulitan ekonomi dan barangkali juga kelompok-kelompok pembangkang di dalam negerinya. Bagi Kamboja alasan itu hanya berlaku secara sebagian oleh karena di kalangan bangsa Kamboja sendiri memang telah tertanam sikap mencurigai Vietnam yang dipandang agresif.

1 Nayan Chanda, "Dong's Quiet Anniversary", *Far Eastern Economic Review*, 23 September 1977, hal. 30—31

PERSPEKTIF DAN IMPLIKASI KONFLIK

Dari uraian singkat yang dikemukakan di atas tampaknya ada dua faktor utama yang mempertajam perselisihan antara Kamboja—Vietnam, yang pertama adalah latar belakang historis permusuhan dan belum definitifnya perbatasan kedua negara, dan yang kedua adalah dicurigainya Vietnam oleh negara-negara tetangganya (khususnya oleh Kamboja) bahwa Vietnam akan melakukan politik hegemoni di kawasan Indocina. Dua faktor lainnya, yaitu persaingan antara dua negara besar untuk mencari pengaruh di kawasan Indocina dan kondisi di dalam negeri Kamboja dan Vietnam secara terbatas, juga turut mempertajam konflik yang telah dilandasi oleh dua faktor utama yang disebutkan lebih dahulu. Sedangkan kesulitan untuk mendefinir perbatasan yang belum pasti pada taraf sekarang dibuat lebih sulit lagi oleh maksud Vietnam untuk mendominir Indocina.

Pada bagian sebelumnya telah dikatakan bahwa pertempuran di daerah perbatasan Kamboja—Vietnam oleh Kamboja dipandang sebagai bagian dari usaha Vietnam untuk mendominir Indocina, khususnya untuk membentuk suatu rezim pemerintahan di Kamboja yang pro Vietnam. Dalam hubungan ini, sebenarnya ada dua pilihan bilamana Vietnam memang mau membentuk suatu pemerintahan yang pro Hanoi di Kamboja. Yang pertama ialah melalui penerobosan masuk secara militer ke seluruh Kamboja dan kemudian memasang orang-orangnya di Phnom Penh sebelum seluruh kesatuan Vietnam ditarik mundur lagi. Jalan ini kelihatannya dapat dilaksanakan dan memberi hasil yang lebih cepat bagi maksud Vietnam. Tetapi kalau Vietnam menempuh jalan ini, ia akan menghadapi dakwaan melakukan invasi terhadap negara tetangganya dan kepercayaan internasional kepada Vietnam akan jauh merosot. Tambahan lagi harga yang harus dibayar oleh Vietnam cukup tinggi, baik karena menghadapi resistensi dari Kamboja sendiri maupun kemungkinan campur tangan RRC di Kamboja. Berdasarkan pada perhitungan ini tampaknya Vietnam tidak akan memilih jalan invasi militer besar-besaran ke Kamboja untuk membangun suatu rezim pemerintahan Kamboja yang pro Hanoi.

Alternatif lainnya yang dapat dijalankan Vietnam ialah melakukan strategi seperti ketika Vietnam Utara mau "merebut" Vietnam Selatan dahulu. Dalam hal ini Vietnam harus membentuk suatu kelompok penentang terhadap pemerintahan yang sekarang menguasai

Kamboja di dalam negeri Kamboja sendiri. Setelah di Kamboja terbentuk suatu barisan perlawanan, Vietnam kemudian dapat bertindak sebagai pensuplai logistik dan pelindung bagi barisan perlawanan ini. Jika jalan demikian ini yang mau ditempuh oleh Vietnam sekarang, barangkali dia membutuhkan waktu yang lebih lama kalau dibandingkan dengan melakukan invasi langsung ke Kamboja dalam usahanya membentuk suatu pemerintahan yang pro Hanoi. Tampaknya apa yang dilakukan oleh Vietnam sekarang ini lebih mendekati strategi ini guna memperteguh kepemimpinannya di kawasan Indocina.

Tetapi mengapa Vietnam dalam pertempuran ini masuk ke dalam wilayah Kamboja? Dapat diperkirakan bahwa ketegangan perbatasan yang memang sudah ada antara Kamboja dan Vietnam dimanfaatkan Vietnam untuk menjalankan strateginya tersebut. Ketegangan itu telah memberikan dalih kepada strategi-strategi militer Vietnam untuk mengirimkan sejumlah besar divisinya ke daerah perbatasannya dengan Kamboja. Fungsi dari divisi-divisi Vietnam yang ditempatkan di daerah perbatasan ini ialah untuk membantu penciptaan suatu kekuatan perlawanan terhadap Kamboja yang unsur-unsurnya dapat diambil dari orang-orang Vietnam keturunan Kamboja yang banyak tinggal di sekitar perbatasan mereka. Dengan tersedianya bantuan logistik yang mencukupi dan lebih lagi dengan ikut sertanya personil-personil pasukan Vietnam melakukan penerobosan ke Kamboja, mungkin dengan suatu taktik subversi yang kontinyu, dalam jangka yang agak lama Kamboja akan jatuh juga ke dalam daerah pengaruh Vietnam.

Hal ini berbeda dengan masa yang lalu, terutama ketika Kamboja masih dikuasai oleh Pangeran Sihanouk. Pada masa yang lalu, meskipun Vietnam telah ditakuti oleh Kamboja, berkat perselisihan di Vietnam sendiri, yaitu konflik Vietnam Utara lawan Vietnam Selatan, Kamboja masih dapat lebih yakin akan kebebasannya. Tetapi pada saat seperti sekarang, dengan bersatunya Vietnam, Vietnam Utara menjadi inti penggerak dalam mempengaruhi dan memaksa Kamboja untuk berada di bawah pengaruh hegemoni Vietnam. Dengan perkataan lain, independensi politik Kamboja sekarang banyak tergantung kepada pola politik Vietnam. Jika Vietnam bertekad kuat untuk memainkan peranan dominan di kawasan Indocina dan menempuh suatu politik yang sama sekali independen dari Moskwa, secara berangsur-angsur tetapi pasti, Hanoi akan mencapai sasarannya tersebut. Bila Vietnam menempuh politik yang demikian itu, kiranya

RRC akan dapat mentolerir peranan Vietnam di Semenanjung Indocina karena musuh Cina Komunis yang sekarang, Uni Soviet, dengan demikian telah dibatasi dalam politik pengepungannya terhadap RRC.

Ditinjau dari segi harga yang harus dibayar oleh Vietnam dalam mencapai sasaran politiknya di Asia Tenggara, strategi ini tampaknya yang paling menguntungkan bagi Vietnam. Tentu saja bila Vietnam berniat benar dalam mencari hegemoni politik di kawasan Indocina seperti yang diutarakan itu, pelaksanaan politik yang demikian akan membawa pengaruh bagi percaturan politik di kawasan Asia Tenggara, karena jika politik itu terlaksana, Vietnam mau tidak mau akan menjadi koordinator dalam kalangan negara-negara Indocina untuk berkomunikasi dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti yang mau dicanangkannya pada tahun 1976 yang lalu. Pada gilirannya ini bisa menyebabkan konfigurasi kekuatan berada dalam dua kutub, ASEAN dan Indocina, dalam komunikasi intra-regional Asia Tenggara.

Tetapi ada suatu persoalan krusial yang barangkali merupakan rintangan bagi Vietnam. Jika benar bahwa Vietnam akan menempuh suatu politik independen, karena selama ini hubungan Vietnam dengan Uni Soviet dinilai lebih baik daripada hubungan Vietnam—RRC, masalahnya ialah bagaimana Vietnam dapat meyakinkan RRC bahwa ia bukan "perpanjangan tangan" Uni Soviet di Asia Tenggara. Republik Rakyat Cina akan tetap menaruh kewaspadaan bagi adanya suatu kawasan Indocina yang didominasi oleh Vietnam. Jaminan apa yang dapat diperolehnya dari Vietnam bahwa ia setelah mendominasi Indocina, tidak akan melakukan suatu politik mendekati Moskwa? Oleh karena itu, jika Vietnam berhasil meyakinkan RRC akan politiknya yang ditempuh, baru kemudian RRC bisa mentolerir adanya suatu kawasan Indocina di bawah pengaruh Hanoi. Tanpa adanya keyakinan semacam itu tampaknya RRC tidak mau membiarkan begitu saja Kamboja ditarik ke dalam orbit pengaruh Hanoi, kecuali jika terdapat suatu perubahan yang drastis ke arah membalikannya hubungan Peking—Moskwa di masa yang akan datang ini.

Tetapi sebaliknya, jika konflik Kamboja—Vietnam sekarang menjadi semakin tajam, misalnya dalam bentuk perang dalam skala yang lebih besar lagi, ada beberapa implikasi yang bisa diperkirakan akan terjadi di Asia Tenggara. Pertama, konflik itu akan mengundang

semakin intensifnya persaingan antara Uni Soviet dan RRC di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indocina. Pengalaman menunjukkan bahwa di mana terdapat konflik intra-regional, negara-negara besar yang berkepentingan merasa terpanggil untuk ikut campur di dalam konflik tersebut.¹ Pada gilirannya kehadiran negara-negara besar yang berkepentingan ini akan semakin mempertajam konflik dan sebagai akibatnya stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara akan terganggu. Ini berarti bahwa cita-cita terselenggaranya suatu kawasan Asia Tenggara yang damai akan semakin jauh dan lama dicapai.

Kedua, sebagai akibat lebih lanjut dari yang pertama, bisa jadi konflik Kamboja—Vietnam yang semakin tajam akan melahirkan aliansi negara-negara dalam kawasan Indocina dengan negara-negara besar di luar kawasan Asia Tenggara. Kamboja yang sekarang lebih intim bersahabat dengan Peking mungkin saja meminta pertolongan dari RRC secara militer untuk menghadapi Vietnam yang secara militer jauh lebih kuat. Di lain pihak, ada kemungkinan Vietnam akan menjadi lebih dekat dengan Uni Soviet, jika ia merasa terancam oleh hadirnya kekuatan militer Cina di Kamboja, sebagai sandaran untuk memperoleh persenjataan dan bantuan ekonomi bagi kepentingan Vietnam. Ketakutan Vietnam pada RRC mungkin tidak terlalu sulit untuk diterangkan karena pada masa yang lalu Cina merupakan salah satu pengancam utama bagi eksistensi Vietnam, Vietnam bahkan pernah menjadi daerah jajahannya. Dengan demikian dapat diperkirakan, jika skala konflik Kamboja—Vietnam terus meningkat, bahwa akan timbul semacam perjanjian pertahanan Kamboja—RRC dan Vietnam—Uni Soviet untuk jangka waktu tertentu.

Akhirnya, konflik dalam suatu kawasan dapat membawa akibat tersendiri bagi pola hubungan intra-regional. Kalau dalam hubungannya dengan negara luar kawasan mungkin konflik itu akan melahirkan suatu aliansi atau semacam perjanjian pertahanan, konflik Kamboja—Vietnam itu akan mempengaruhi hubungan antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya negara-negara ASEAN, dan negara-negara di kawasan Indocina khususnya yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Barangkali akan ada anggapan bahwa, mengingat perbedaan sistem sosial dan politik antara ASEAN dan In-

¹ Ada contoh-contoh konflik intra-regional yang kemudian menjadi besar akibat campur tangan negara-negara besar yang ingin mengambil untung dari konflik tersebut. Konflik India—Pakistan yang kemudian melahirkan negara baru, Bangladesh, dan konflik di dalam negeri Angola di Afrika misalnya, melibatkan kepentingan-kepentingan dari Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC.

docina, konflik itu akan menguntungkan bagi negara-negara ASEAN karena negara-negara Indocina yang dahulu mengkritik ASEAN akan dipaksa terus memusatkan perhatiannya pada masalah mereka sendiri. Sejuah mana kebenaran anggapan ini kiranya masih perlu dipersoalkan dan dibuktikan lebih lanjut. Tetapi bila konflik itu berhasil mengundang masuknya negara-negara besar yang berkepentingan untuk mengadu nasibnya di Vietnam, tampaknya cita-cita negara-negara ASEAN untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai suatu kawasan yang damai, bebas, dan netral akan menjadi semakin jauh.

PENUTUP

Untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi antara Kamboja dan Vietnam sekarang, tampaknya jalan yang paling baik adalah melalui meja perundingan. Untuk itu Vietnam telah memulai inisiatif menawarkan diselenggarakannya suatu perundingan dengan Kamboja untuk menyelesaikan masalah bersama mereka. Tetapi Kamboja tampaknya belum mau menempuh jalan perundingan sebagaimana yang ditawarkan oleh Vietnam. Kalau Kamboja bersikeras menganut jalan yang sekarang dipilihnya, yaitu menyelesaikan persoalan mereka, apakah masalah perbatasan atau karena ketakutan akan ekspansi politik Vietnam, dengan membiarkan saja berlangsungnya suasana konflik atau bahkan meningkatkan skala pertempuran dengan Vietnam, Kamboja menyanggah risiko akan didobrak oleh Vietnam secara militer jika Vietnam berhasil meyakinkan RRC akan politik Kamboja yang tidak masuk akal itu. Risiko yang lebih jelek lagi bagi Kamboja ialah bahwa pada akhirnya ia harus tunduk kepada perintah Hanoi jika ia sekarang terus membiarkan semua insiden-insiden di daerah perbatasan dengan Vietnam berlangsung terus. Olah karena itu demi eksistensi dan kemerdekaannya sebagai unit politik, maka bagi Kamboja adalah lebih baik untuk menyelesaikan konfliknya dengan Vietnam lewat perundingan-perundingan.

Bagi Vietnam, sebagai suatu negara yang dominan dalam politik di Asia Tenggara karena kekuatannya, bila juga sungguh-sungguh menghendaki adanya suatu penyelesaian damai atas konfliknya dengan Kamboja, usahanya untuk mengajak Kamboja berunding adalah cukup simpatik. Namun suatu hal perlu diingat, sebagai suatu negara

yang cukup besar dalam kawasan Asia Tenggara, maka perundingannya dengan Kamboja harus dilaksanakan atas dasar kesederajatan dan realitas yang ada. Ini berarti bahwa Vietnam harus dapat menghargai harkat dan derajat negara tetangganya sebagai suatu negara yang berdaulat. Jika hal seperti ini dapat terwujud, kiranya tidak perlu lagi masalah perbatasan dan ketakutan Kamboja pada Vietnam dibicarakan melalui kekerasan senjata. Penyelesaian konflik secara damai akan banyak memberi andil bagi stabilitas dan keamanan tidak saja di kawasan Indocina, tetapi juga bagi seluruh Asia Tenggara.